



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**KECAMATAN PEKANBARU KOTA
KOTA PEKANBARU
2025**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 - 2029 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 - 2029 merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan ini, maka Kabupaten / Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 dan secara bersamaan seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang berkesinambungan dengan rencanan Pembangunan daerah.

Dokumen Renstra merupakan perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 – 2029 yang berkesinambungan dengan RPJMD Kota Pekanbaru ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Pekanbaru Kota dan akan diturunkan menjadi RKA Kecamatan Pekanbaru Kota untuk lima tahun kedepan.

Seluruh dokumen perencanaan Kecamatan Pekanbaru Kota yang disusun secara berkesinambungan ini diharapkan dapat membantu dan mendukung untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 – 2029 ini masih belum optimal, oleh karena itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif terhadap penyusunan Renstra ini. sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 -2029 kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekanbaru Kota selama lima tahun kedepan sehingga dapat membantu mewujudkan Visi Kota Pekanbaru, yaitu “Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera”

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, September 2025

CAMAT PEKANBARU KOTA



REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 199105212012062001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	29
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	34
3.2. Sasaran Renstra K/L dan Renstra.....	36
3.3. Strategi Perangkat Daerah	42
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	44
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
4.1. Uraian Program	48
4.2. Uraian Kegiatan	50
4.3. Uraian Subkegiatan	70
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	78
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	78
4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	78
 BAB V PENUTUP	80
 LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

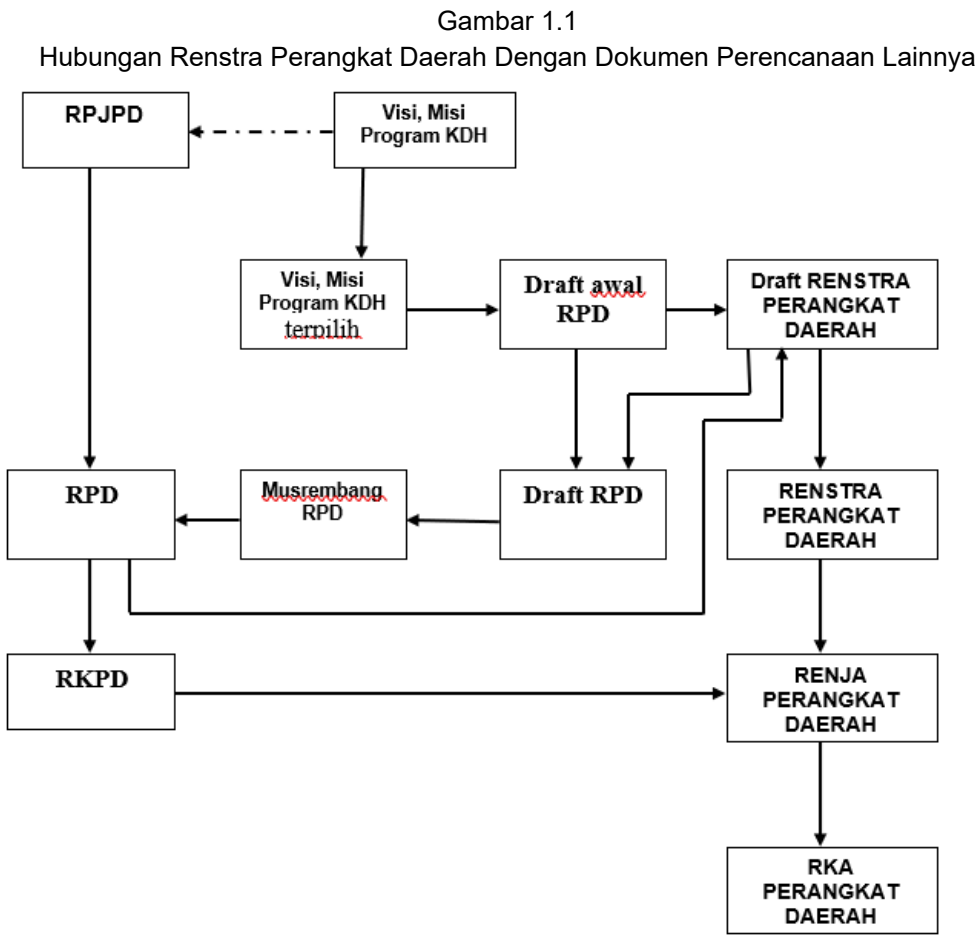
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis. Dokumen Renstra merupakan perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dan melaksanakan kegiatan operasional, memastikan keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Kabupaten / Kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 dan secara bersamaan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang berkesinambungan dengan rencanan Pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Pekanbaru Kota menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 - 2029 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2025 – 2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPD Kota Pekanbaru 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya seperti tergambar dalam table berikut ini:



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Peraturan dan per Undang-undangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekanbaru Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025 – 2029.

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru. Disamping itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun, serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Pekanbaru Kota, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekanbaru Kota yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang rumusan latar belakang, indentifikasi dasar hukum, uraian maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan dan kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah, serta mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan tentang rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang penentuannya didasarkan pada sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Berisikan tentang program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

e. BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Gambaran Geografis Kecamatan Pekanbaru Kota

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah yang bertugas membantu Kepala Daerah. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik, kedudukan dan fungsi pemerintah Kecamatan sangatlah penting karena itu Pemerintah Kecamatan harus mampu memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang di wilayahnya.

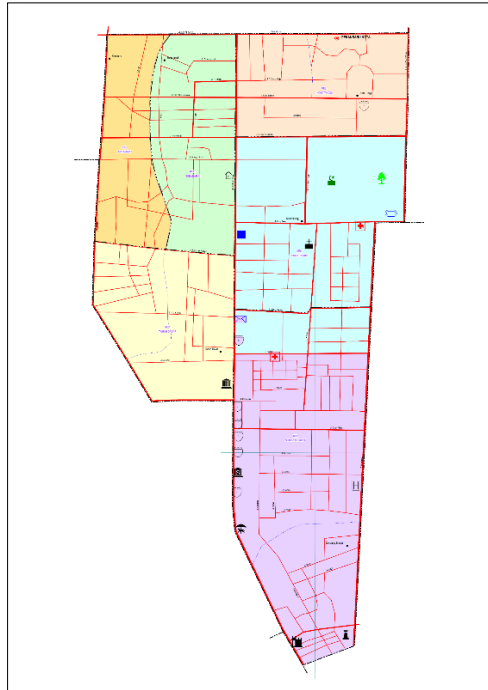
Pemerintah Kota pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kecamatan dengan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5) yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 2 point (1) dimana dinyatakan bahwa Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan.

Secara geografis Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang mempunyai letak yang sangat strategis karena berada di pusat Kota Pekanbaru. Kecamatan Pekanbaru Kota terletak di antara 0051-0053' Lintang Utara dan 120044'-101045' Bujur Timur. Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Senapelan;

- b. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Sail;
- c. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Sail;
- d. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota



Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 6 kelurahan dengan total luas wilayah sebesar 2,26 km². Kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Simpang Empat, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Sukaramai, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Kota Tinggi, dan Kelurahan Tanah Datar. Selain itu Kecamatan Pekanbaru Kota juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.118 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kelurahan Tanah Datar dan paling sedikit pada Kelurahan Simpang Empat. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Kecamatan Pekanbaru Kota sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan bantuan 38 RW, 118 RT, dan 7 LPM.

Berikut penjabaran sebaran data penduduk yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota, antara lain:

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk,Kecamatan Pekanbaru Kota

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah RW	Jumlah RT
			Pria	Wanita	Total		
1	Simpang Empat	0,66	844	961	1.805	5	14
2	Sumahilang	0,51	2.801	2.723	5.524	9	25
3	Tanah Datar	0,29	3.117	3.613	6.730	7	26
4	Kota Baru	0,24	1.925	1.999	3.924	6	21
5	Sukaramai	0,25	2.625	2.719	5.344	7	21
6	Kota Tinggi	0,31	1.977	1.814	3.791	4	11
Total		2,26	13.289	13.829	27.118	38	118

Sumber : Laporan Penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota

2.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 233 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Camat dan Seksi-seksi serta Sub Bagian Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. CAMAT

• Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Lainnya.

• Fungsi

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

2. SEKRETARIS

- **Tugas**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan Program Kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

- **Fungsi**

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Perencanaan program kerja pemerintahan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan;
- e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;.
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- j. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- k. Pelaksanaan evaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

- **Tugas**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan Program Kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

- **Fungsi**

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- b. Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
- d. Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat- rapat dinas dan pelayanan hubungan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja Kecamatan;

- i. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;
- j. Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), registrasi ASN dan DUK;
- k. Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang Kecamatan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kecamatan;
- m. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- n. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- o. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- p. Pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- q. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

- **Tugas**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan Program Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

- **Fungsi**

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan;
- f. Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- h. Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- i. Perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;

- l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

- **Tugas**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerjs Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan, Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan, kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan seperti LPM, Lembaga Adat TP.PKK, RT/RW, Karang taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- l. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

- **Tugas**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerjs Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standarlainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat;
- e. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

- pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- **Tugas**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan Kecamatan;

- c. Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- **Tugas**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
- b. Perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan social;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan social;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan social;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

- i. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. SEKSI PELAYANAN TERPADU

- **Tugas**

Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerjs Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

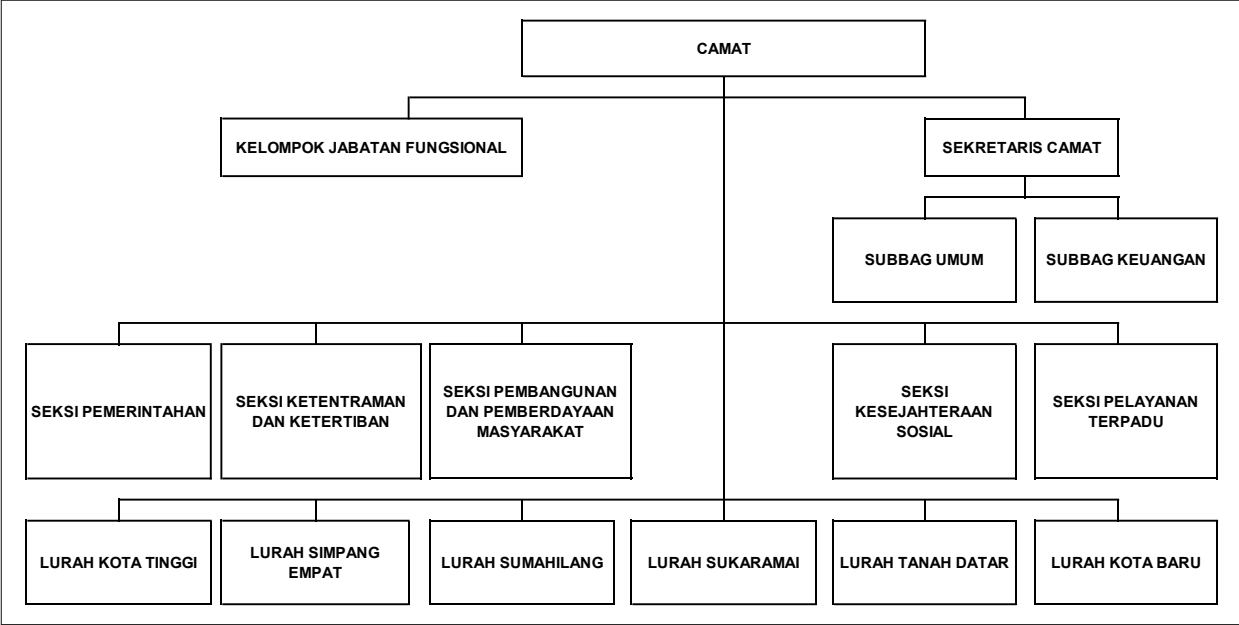
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 233 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- 4) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Pelayanan Terpadu
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pekanbaru Kota yang mempunyai luas wilayah 2,26 km² yang meliputi 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk 27.118 jiwa, didukung oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 20 orang Tenaga Harian Lepas. Adapun komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Pekanbaru Kota

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		Pria	Wanita	I	II	III	IV	
1	Camat	0	1				1	1
2	Sekretaris Camat	1	0				1	1
3	Kasi Kecamatan	1	2			3		3
4	Kasubbag	0	0					-
5	JFU Kecamatan	2	5			7		7
6	Lurah	3	2			5		5
7	Sekretaris Lurah	1	4			5		5
8	Kasi Kelurahan	4	7			11		11
9	JFU Kelurahan	1	1		1	1		2
10	THL Kecamatan	4	4					-
11	THL Kelurahan	6	6					-
Total		23	32	-	1	32	2	35

Tabel 2.3. Data Pegawai yang Sudah Mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Jenis Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklatpim III	0	1	1
2	Diklatpim IV	2	1	3
3	Struktural yang Belum Diklat	11	20	31
	Total	13	22	35

Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Strata 2 (S2)	2	7	9
2	Strata 1 (S1)	8	13	21
3	Diploma 3 (D3)	1	1	2
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	1	3
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	-
6	Sekolah Dasar (SD)	0	0	-
	Total	13	22	35

Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon III a	0	1	1
2	Eselon III b	1	0	1
3	Eselon IV a	4	4	8
4	Eselon IV b	5	11	16
	Total	10	16	26

Apabila dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun secretariat baik di Kecamatan mauun dikelurahan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, keberadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang menjadi aset/modal Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana Kecamatan Pekanbaru Kota

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
	Tanah		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.458 m2	KANTOR CAMAT PEKANBARU KOTA (JL. TEUKU UMAR NO. 20)
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	803 m2	KANTOR LURAH KOTA BARU (JL. AHMAD YANI NO. 37)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	257 m2	KANTOR LURAH KOTA TINGGI (JL. GATOT SUBROTO NO. 55)
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	637 m2	KANTOR LURAH SIMPANG EMPAT (JL. RUPAT NO.12)
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	267 m2	KANTOR LURAH SUKARAMAI (JL. NILAM GG. KARYA NO. 3)
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	580 m2	KANTOR LURAH TANAH DATAR (JL. MUSLIMIN NO. 10)
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120 m2	BALAI PERTEMUAN KOTA TINGGI (JL. T. ZAINAL ABIDIN)
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	96 m2	BALAI DESA SUKARAMAI (JL. PANGERAN HIDAYAT)
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	275 m2	UEK KOTA PEKANBARU (JL. HANG TUAH NO. 68)
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	350 m2	KANTOR LURAH SUMAHILANG (JL. M. DAHLAN NO. 20)
	Gedung dan Bangunan		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.458 m2	Gedung Kantor Camat Pekanbaru Kota (JL. TEUKU UMAR NO.20)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	262 m2	GEDUNG KANTOR LURAH KOTA BARU (JL. AHMAD YANI NO. 37)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	184 m2	BALAI DESA KELURAHAN SIMPANG EMPAT (JL. ENGGANO)
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96 m2	BALAI DESA KELURAHAN SUKARAMAI (JL. PANGERAN HIDAYAT)
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	177 m2	UEK KOTA PEKANBARU (JL. HANG TUAH NO. 68)
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	287 m2	GEDUNG KANTOR LURAH TANAH DATAR (JL. MUSLIMIN NO. 10)
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	42 m2	Kantor Kelurahan Sukaramai (JL. NILAM GG. KARYA NO. 3)
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	209 m2	Kantor Kelurahan Kota Tinggi (JL. GATOT SUBROTO NO. 55)
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	204 m2	GEDUNG KANTOR LURAH SUMAHILANG (JL. M. DAHLAN NO. 20)
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	110 m2	Kelurahan Simpang Empat (Jl. Rupert No. 12)
	Peralatan dan Mesin		
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	2 Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	7 Unit	
3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22 Unit	
4	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2 Unit	
5	Filing Cabinet	16 Unit	
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28 Unit	
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9 Unit	
10	Kursi Tamu	11 Unit	
11	Kursi Rapat	100 Unit	
12	Kursi Biasa	150 Unit	
13	Kursi Besi	4 Unit	
14	Kursi Putar	44 Unit	

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
15	Sofa	8 Set	
16	Meja Rapat	1 Unit	
17	Meja 1/2 Biro	51 Unit	
18	Peta	1 Unit	
19	A.C. Split	13 Unit	
20	A.C. Floor	1 Unit	
21	Printer	14 Unit	
22	P.C. Unit	18 Unit	
23	Laptop	4 Unit	
24	Note Book	2 Unit	
25	CCTV	7 Set	
26	Speaker	6 Set	
27	Mesin Foto Copy	1 Unit	
28	Brandkas	1 Unit	
29	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	
30	Mesin Absensi	1 Unit	
31	Projektor	1 Unit	
32	Camera Film	1 Unit	
33	Televisi	14 Unit	
34	Kipas Angin	7 Unit	
35	Megaphone	1 Unit	
36	Microphone Floor Stand	1 Unit	
37	Amplifier	2 Unit	
38	Wireless	1 Unit	
39	Tangki Air	1 Unit	
40	Podium	2 Unit	
41	Portable Generating Set	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dibandingkan target pada Renstra periode 2023-2026 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2023-2026 tertuang pada tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	202	202	100,00%	204	204	100,00%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,5	81,68	94,43%	87,5	85,67	97,91%
RATA-RATA CAPAIAN						97,21%			98,95%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dibandingkan target pada Renstra periode 2023-2026 belum cukup bagus (ada kesenjangan/gap pelayanan), tidak semua target yang ditetapkan berhasil tercapai. Adapun faktor–faktor yang memepengaruhi keberhasilan / kegagalan pencapaian target antara lain:

- Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:
 - Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
 - Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah.
 - Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik
- Faktor yang mempengaruhi kegagalan capaian kinerja, antara lain:
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Operasional Pelayanan.
 - Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada dibandingkan dengan beban tugas yang diemban.

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
- Adanya Refocusing anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah periode perencanaan sebelumnya tertuang pada tabel 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru

No.	Program	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.657.472.828	7.700.398.316	7.238.403.787	7.336.925.215	94,53%	95,28%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	0,00%	0,00%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.680.731.969	1.530.506.500	1.617.389.800	1.521.776.400	96,23%	99,43%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.388.600	249.999.928	99.930.100	-	88,91%	0,00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.613.879.495	1.817.025.632	1.598.196.474	1.639.421.722	99,03%	90,23%
TOTAL		11.064.472.892	11.297.930.376	10.553.920.161	10.498.123.337		

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru antara tahun 2023 - 2024 dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Pekanbaru Kota tidak terlalu baik. Pada tahun

2023, ada 1 program yang capaiannya 0% dan pada tahun 2024 ada 2 program yang capaiannya 0%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja belum maksimal. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target.
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Sedangkan penghambat kurang maksimalnya penyerapan anggaran adalah:

- Adanya Jabatan yang kosong sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
- Adanya efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tidak terlaksana.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa dilaksanakan 100% seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik yang realisasi setiap bulannya sesuai dengan penggunaan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Tugas pokok SKPD Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Pekanbaru Kota yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a) Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- b) Seluruh Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan.
- c) Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
- d) Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e) Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
- f) Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- g) Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dilingkungan Kecamatan Pekanbaru Kota, seperti Pegawai Kecamatan dan Kelurahan, LPM, RT, RW, Kader Posyandu, Petugas Masjid Paripurna, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi

merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekanbaru Kota dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi Kecamatan Pekanbaru Kota antara lain:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Kurangnya pelatihan yang mampu menunjang peningkatan ketrampilan pegawai dalam pelayanan publik
3. Belum optimalnya ketersediaan data terpadu di Kecamatan
4. Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja

Berikut Teknik menyimpulkan isu strategis pada Kecamatan Pekanbaru Kota tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perngkat Daerah

Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
		Global	Nasional	Regional	
Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kecamatan melalui pengelolaan sumber daya yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, akurat dan transparan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku	Mengembangkan keterpaduan sistem informasi guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
Pelaksanaan evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum dilakukan secara menyeluruh, mendalam dan berjenjang.	Keterbatasan SDM dalam tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas AKIP melalui perencanaan kinerja yang jelas, penetapan sasaran yang terukur serta pengawasan dan evaluasi yang konsisten	Kurangnya komitmen, keselarasan peraturan, keterbatasan SDM, serta integrasi SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran	Kurangnya pemahaman publik tentang evaluasi, inkonsistensi data yang dilaporkan, dan interpretasi nilai akuntabilitas kinerja yang keliru	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Beberapa isu strategis Kecamatan Pekanbaru Kota yang teridentifikasi antara lain:

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik harus mampu dalam memberikan pelayanan yang ideal kepada Masyarakat. Pelayanan yang ideal kepada Masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan public yang ideal perlu adanya pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan Masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Selain itu, kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Pekanbaru Kota yang menjalankan fungsi pelayanan publik

perlu untuk ditingkatkan karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan Masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pelayan public yang akuntabel, efektif dan efisien sangat diharapkan dapat terpenuhi. Karena sarana dan prasarana seperti Laptop / PC, Printer dan Kendaraan Dinas Operasional sangat dibutuhkan untuk terlaksananya pelayanan yang prima.

2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Beberapa permasalahan yang mengakibatkan system penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan diperbarui serta disesuaikan dengan dinamika kebutuhan Masyarakat. Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transformative, bersih, melayani dan Amanah. Kecamatan Pekanbaru Kota sendiri masih mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hal itu dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasaran yang mendukung dalam peningkatan kinerja. Selain itu juga terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ada juga permasalahan dalam dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Pekanbaru 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan,

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Walikota Pekanbaru yaitu ***Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera***, Kecamatan Pekanbaru Kota akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota dalam berbagai sektor,

termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Pekanbaru Kota menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu ***Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas***. Tujuan tersebut selaras dengan salah satu misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029, yaitu: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekanbaru Kota, dalam hal diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekanbaru dapat tercapai.

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah :

- Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)

Merupakan nilai evaluasi untuk mengukur kinerja kecamatan setiap tahun. Formula hasil penilaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi kinerja kecamatan yang dilakukan oleh tim Penilaian EKK dari Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Penilaian EKK mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a. Kompetensi camat dan koordinasi urusan pemerintahan umum.
- b. Koordinasi kegiatan pemerintahan kecamatan.
- c. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.
- d. Penyelenggaraan tugas lainnya.

- e. Inovasi camat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode lima tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pekanbaru Kota menetapkan sasaran strategi yaitu

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan.

Rumusan Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan digunakan. Indikator sasaran Kecamatan Pekanbaru Kota adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota

Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah berhasil menerapkan SAKIP dalam mencapai tujuan kinerjanya. Formula Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota diperoleh dari penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru setiap tahun.

Unsur penilaian SAKIP terdiri atas:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan
Indikator Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Pekanbaru Kota

Nilai IKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, yang merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan atau produk, biasanya digunakan dalam konteks pelayanan publik. Nilai IKM Kecamatan Pekanbaru Kota diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Pekanbaru Kota. Formula untuk mendapatkan Nilai IKM diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga.

Unsur penilaian IKM terdiri dari:

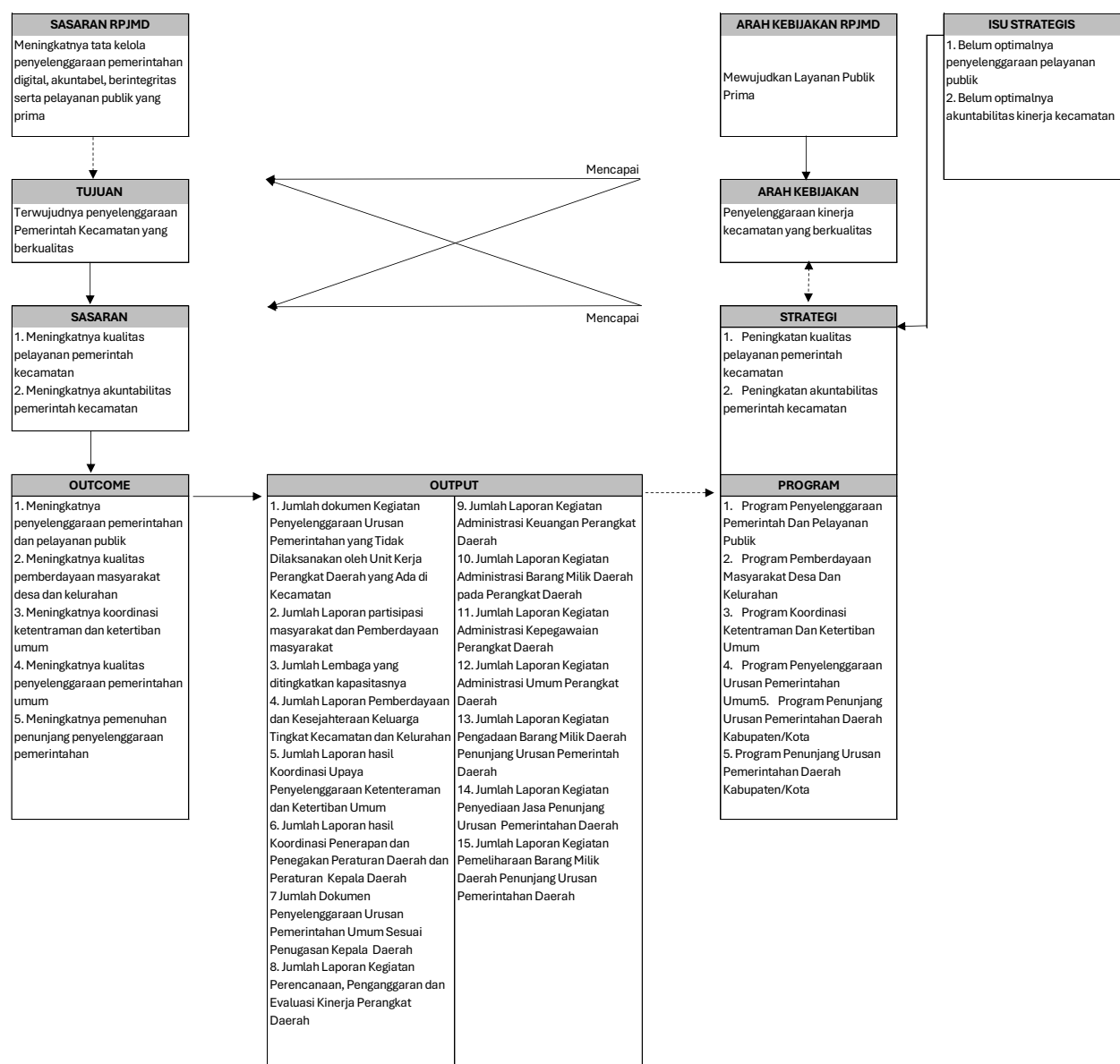
- a. Persyaratan Pelayanan
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan prasarana

Hasil IKM dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, dan membuat kebijakan yang lebih baik.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Konsep penyusunan renstra Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1. Konsep Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Pekanbaru Kota yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

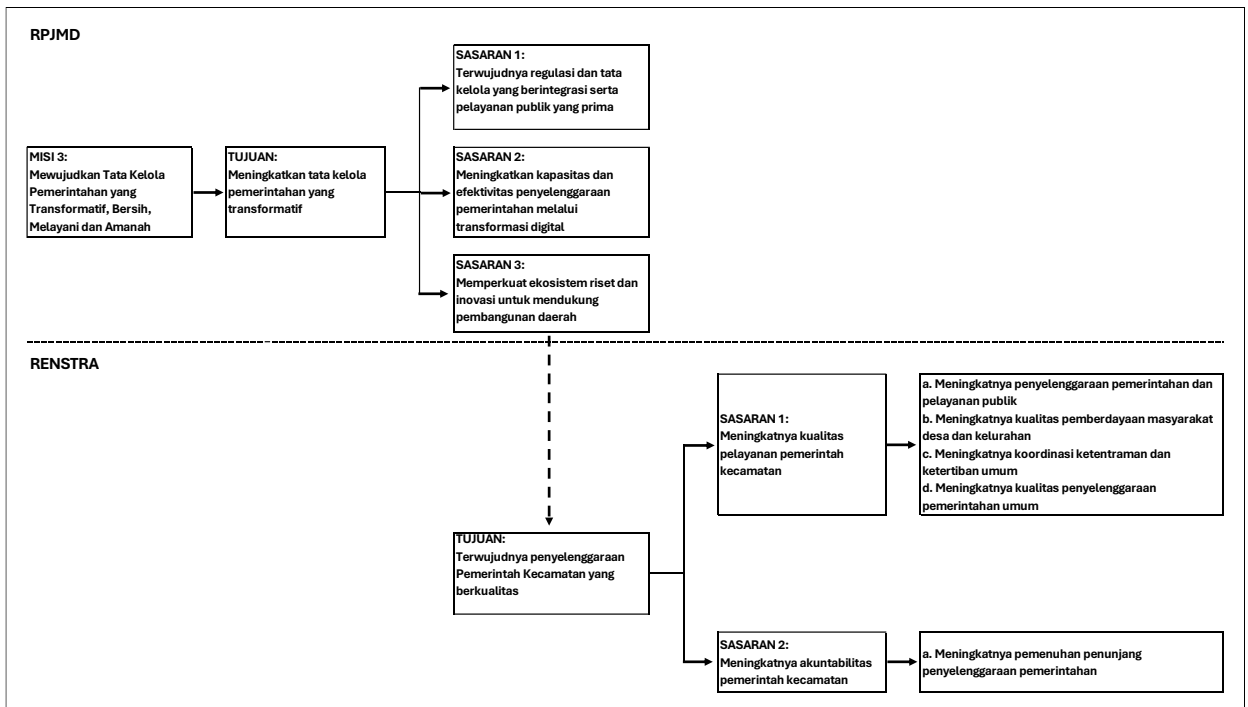
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang

sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Pekanbaru Kota adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
					2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA													
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital, akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yg Berkualitas		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) (Nilai)	80,8	81,6	81,9	82,2	82,5	82,8	83,1	IKU	Penilaian EKK mencakup berbagai aspek, antara lain: a. Kompetensi camat dan koordinasi urusan pemerintahan umum b. Koordinasi kegiatan pemerintahan kecamatan c. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan d. Penyelenggaraan tugas lainnya e. Inovasi camat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi kinerja kecamatan yang dilakukan oleh tim Penilaian EKK Kota Pekanbaru
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Nilai)	85,67	85,8	85,9	86	86,1	86,2	86,3	IKU	Unsur penilaian IKM terdiri dari : Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Sarana dan prasarana.	Nilai IKM diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan (Nilai)	54,75	58,85	60	60,5	61	61,5	62	IKU	Unsur penilaian SAKIP terdiri atas: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Formula Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota diperoleh dari penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru setiap tahunnya

Visi, Misi, Strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas

sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025-2029

VISI : Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1. Modernisasi infrastruktur pelayanan publik 2. Digitalisasi layanan berbasis teknologi

VISI : Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan usaha produktif, peningkatan kualitas sosial serta kesejahteraan warga, pembangunan infratraktur skala lokal berbasis kebutuhan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna 4. Peningkatan koordinasi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum 5. Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna kecamatan dan kelurahan 6. Penguatan koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan dalam upaya percepatan tindak lanjut pengaduan
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Peningkatan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1. Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan 3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan asset 4. Transparansi dan pelibatan publik 5. Penguatan koordinasi dan supervisi dari pemerintah kabupaten

3.3 STRATEGI KECAMATAN PEKANBARU KOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut.

Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru secara efektif dan berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Rumbai Barat mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategic juga dapat

digunakan untuk melakukan transformasi birokrasi. Perencanaan strategic juga mengagendakan program yang mendukung layanan kepada masyarakat.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota, yaitu:

- 1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
- 2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah;
- 3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
- 4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Penahapan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan

pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut:

Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Pekanbaru Kota

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan dan sinkronisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan	
			Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
3	Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kemandirian fiskal	Meningkatkan Kualitas laporan Keuangan dan aset	
			Transparansi dan Pelibatan Publik	
4	Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perluasan akses dan pemerataan layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
			Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
5	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan	Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan usaha produktif, peningkatan kualitas sosial serta kesejahteraan warga, pembangunan infrastruktur skala lokal berbasis kebutuhan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna.	
6	Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perluasan akses dan pemerataan layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Peningkatan Koordinasi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum.	
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan	
			Penguatan Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan dalam upaya percepatan tindak lanjut pengaduan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Rumbai Barat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Peran Strategis Kecamatan Pekanbaru Kota menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesign sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan Sumber Daya Manusia (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

4.1 URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Pekanbaru Kota ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut:

a. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan

kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, melalui pelatihan, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kelembagaan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat.

d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah program yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat melalui koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah (seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan), tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta melakukan penegakan peraturan daerah dan penanganan pengaduan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan kondusif.

e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal.

4.2 URAIAN KEGIATAN

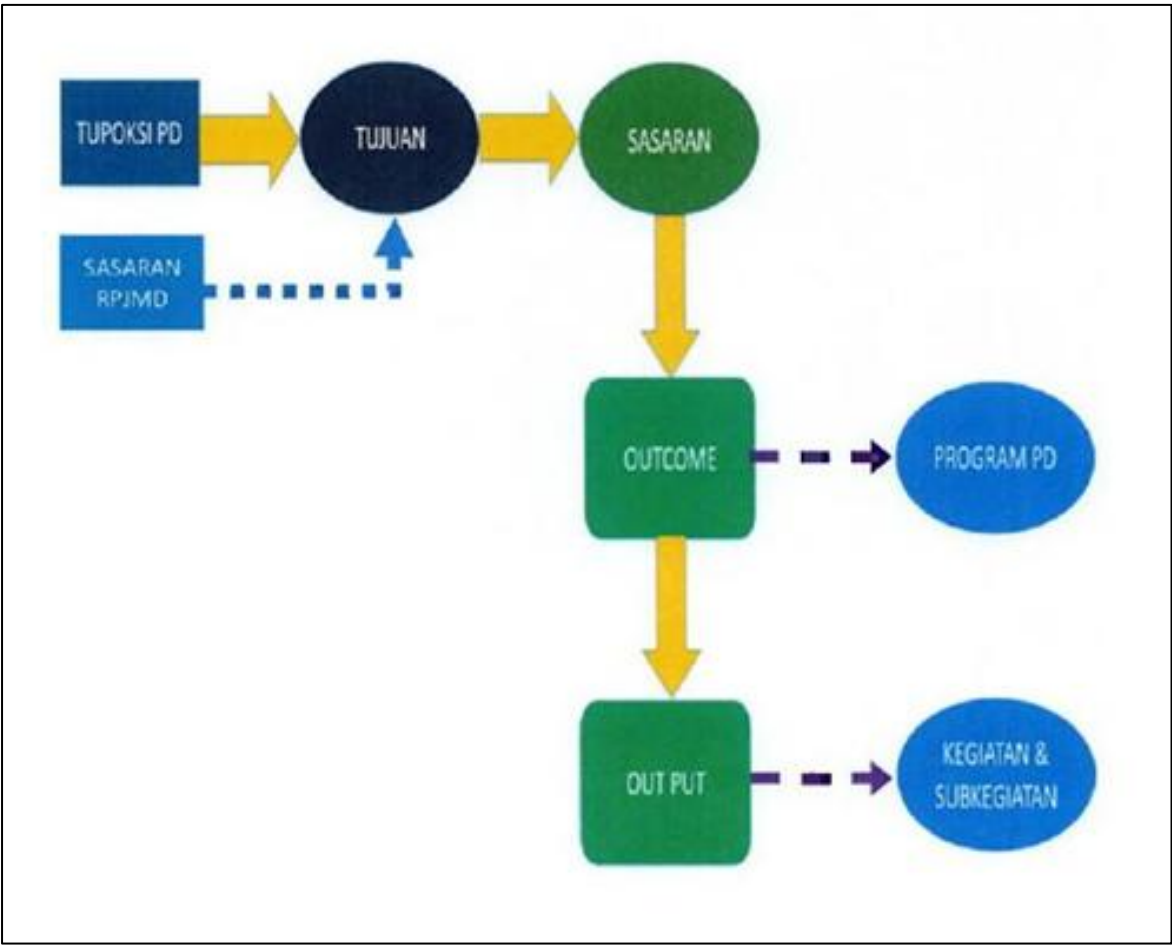
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- k. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- l. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- m. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- n. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota



Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA							
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital, akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yg Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) (Nilai)		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Nilai)		
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan		Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
					Nilai SAKIP Kecamatan (Nilai)		
					Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU
INDIKATIF**

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01 Kecamatan				11.383.759.479		13.016.626.202		13.236.794.956		14.921.678.623		16.606.562.289		18.291.445.955		19.976.329.622
7.01.01-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 %	7.786.227.419	100 %	9.774.317.413	100 %	9.792.244.956	100 %	10.473.500.000	100 %	11.525.400.000	100 %	12.730.445.955	100 %	13.347.329.622
7.01.01.2.01-Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.921.400	1 Laporan	23.649.520	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	37.500.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000
7.01.01.2.01.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.339.000	10 Dokumen	7.592.880	7 Dokumen	8.000.000	7 Dokumen	8.500.000	7 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	12.000.000	7 Dokumen	13.000.000
7.01.01.2.01.0006- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.074.400	4 Laporan	5.470.200	4 Laporan	5.500.000	4 Laporan	8.500.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	13.000.000
7.01.01.2.01.0007- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.508.000	2 Laporan	4.146.000	2 Laporan	4.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.000.000
7.01.01.2.01.0008- Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A Dokumen	-	1 Dokumen	2.823.630	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.000.000
7.01.01.2.01.0009- Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	N/A Data	-	1 Data	3.616.810	1 Data	4.000.000	1 Data	6.500.000	1 Data	10.000.000	1 Data	12.000.000	1 Data	13.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.01.2.02-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan ketepatan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	5.161.037.057	1 Laporan	7.338.852.061	1 Laporan	7.446.577.937	1 Laporan	7.615.000.000	1 Laporan	7.770.000.000	1 Laporan	7.880.445.955	1 Laporan	8.059.329.622
7.01.01.2.02.0001-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan	5.155.638.857	38 Orang / Bulan	7.329.677.941	40 Orang / Bulan	7.435.077.937	42 Orang / Bulan	7.602.000.000	44 Orang / Bulan	7.750.000.000	46 Orang / Bulan	7.856.445.955	48 Orang / Bulan	8.033.329.622
7.01.01.2.02.0005-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.008.300	2 Laporan	5.313.520	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.000.000
7.01.01.2.02.0007-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.389.900	1 Laporan	3.860.600	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.000.000
7.01.01.2.03.-Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan akurasi data Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	5.735.800	1 Laporan	11.628.370	1 Laporan	11.700.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	26.000.000
7.01.01.2.03.0002-Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3.790.000	1 Dokumen	7.629.640	1 Dokumen	7.700.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.000.000
7.01.01.2.03.0005-Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapoean Barang Milik daerah pada SKPD	4 Laporan	1.945.800	4 Laporan	3.998.730	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	13.000.000
7.01.01.2.05-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Laporan	-	1 Laporan	66.948.000	1 Laporan	78.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	190.000.000
7.01.01.2.05.0002-Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	-	43 Paket	32.250.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	100.000.000
7.01.01.2.05.0011-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Orang	-	3 Orang	34.698.000	4 Orang	38.000.000	4 Orang	40.000.000	5 Orang	50.000.000	6 Orang	60.000.000	8 Orang	90.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.01.2.06- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.136.204.608	1 Laporan	886.470.590	1 Laporan	1.071.600.000	1 Laporan	1.273.000.000	1 Laporan	1.485.400.000	1 Laporan	1.696.000.000	1 Laporan	1.907.000.000
7.01.01.2.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	146.705.700	1 Paket	72.611.350	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	180.000.000
7.01.01.2.06.0002- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	N/A Paket	-	2 Paket	93.360.070	1 Paket	70.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	180.000.000
7.01.01.2.06.0003- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A Paket	-	- Paket	-	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	170.000.000	1 Paket	180.000.000
7.01.01.2.06.0004- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	819.405.200	7 Paket	461.502.810	5 Paket	440.000.000	5 Paket	470.000.000	5 Paket	490.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	520.000.000
7.01.01.2.06.0005- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	96.799.708	2 Paket	83.461.160	2 Paket	85.000.000	2 Paket	120.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	170.000.000	2 Paket	200.000.000
7.01.01.2.06.0006- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang- undangan yang Disediakan	96 Dokumen	14.400.000	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	15.400.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	17.000.000
7.01.01.2.06.0008- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	200.000.000
7.01.01.2.06.0009- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	57.894.000	24 Laporan	155.436.000	24 Laporan	130.000.000	26 Laporan	200.000.000	28 Laporan	240.000.000	30 Laporan	260.000.000	32 Laporan	280.000.000
7.01.01.2.06.0010- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	7.499.200	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.06.0011- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	48.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000
7.01.01.2.07- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	251.965.200	1 Laporan	570.417.580	1 Laporan	229.050.000	1 Laporan	305.000.000	1 Laporan	670.000.000	1 Laporan	1.230.000.000	1 Laporan	1.095.000.000
7.01.01.2.07.0001- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	270.000.000	- Unit	-
7.01.01.2.07.0002- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	70.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	85.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.01.2.07.0005-Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	5 Unit	57.520.300	2 Unit	57.600.000	4 Unit	50.000.000	5 Unit	55.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	130.000.000	12 Unit	150.000.000
7.01.01.2.07.0006-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	16 Unit	194.444.900	11 Unit	75.674.880	12 Unit	70.000.000	9 Unit	100.000.000	10 Unit	150.000.000	12 Unit	160.000.000	15 Unit	180.000.000
7.01.01.2.07.0007-Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	80.000.000
7.01.01.2.07.0009-Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	170.000.000	2 Unit	200.000.000
7.01.01.2.07.0010-Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	-	2 Unit	437.142.700	7 Unit	84.350.000	4 Unit	50.000.000	6 Unit	100.000.000	8 Unit	200.000.000	9 Unit	250.000.000
7.01.01.2.07.0011-Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	-	- Unit	-	2 Unit	24.700.000	4 Unit	50.000.000	6 Unit	100.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000
7.01.01.2.08-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	826.221.854	1 Laporan	729.441.292	1 Laporan	725.000.000	1 Laporan	820.000.000	1 Laporan	870.000.000	1 Laporan	970.000.000	1 Laporan	1.060.000.000
7.01.01.2.08.0002-Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	184.925.862	2 Laporan	199.323.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	210.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	270.000.000
7.01.01.2.08.0003-Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	174.963.800	1 Laporan	58.386.100	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000
7.01.01.2.08.0004-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	466.332.192	1 Laporan	471.732.192	1 Laporan	430.000.000	1 Laporan	480.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	520.000.000	1 Laporan	540.000.000
7.01.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya kondisi sarana dan prasarana kerja perangkat daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	393.141.500	1 Laporan	146.910.000	1 Laporan	204.317.019	1 Laporan	320.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	740.000.000	1 Laporan	945.000.000
7.01.01.2.09.0001-Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	98.376.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.01.2.09.0002- Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	-	9 Unit	116.180.000	9 Unit	120.000.000	10 Unit	130.000.000	11 Unit	155.000.000	13 Unit	170.000.000	10 Unit	190.000.000
7.01.01.2.09.0005- Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	3 Unit	20.000.000	4 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	5 Unit	60.000.000
7.01.01.2.09.0006- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	29.995.000	45 Unit	30.730.000	50 Unit	38.000.000	50 Unit	40.000.000	53 Unit	50.000.000	57 Unit	60.000.000	65 Unit	70.000.000
7.01.01.2.09.0007- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	35.000.000
7.01.01.2.09.0009- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	209.770.500	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	200.000.000
7.01.01.2.09.0010- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	55.000.000	- Unit	-	1 Unit	46.317.019	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000
7.01.01.2.09.0011- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	30.000.000	2 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	4 Unit	150.000.000
7.01.02-Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80 %	-	80 %	6.517.820	80 %	15.000.000	80 %	50.000.000	80 %	100.000.000	80 %	145.000.000	80 %	169.000.000
7.01.02.2.02-Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	- Laporan	-	1 Laporan	6.517.820	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	145.000.000	1 Laporan	169.000.000
7.01.02.2.02.0001- Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	N/A Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	29.000.000
7.01.02.2.02.0002- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- Laporan	-	1 Laporan	6.517.820	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.02.2.02.0003-Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000
7.01.03-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	70 %	1.530.506.500	70 %	1.543.105.020	70 %	1.610.950.000	70 %	2.140.000.000	70 %	2.391.162.289	70 %	2.626.000.000	70 %	3.320.000.000
7.01.03.2.02-Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	135.569.300	1 Laporan	100.817.820	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	291.162.289	1 Laporan	376.000.000	1 Laporan	770.000.000
7.01.03.2.02.0001-Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyara katan	49.927.700	3 Lembaga Kemasyaraka tan	60.557.470	3 Lembaga Kemasyaraka tan	65.000.000	3 Lembaga Kemasyarakat an	80.000.000	3 Lembaga Kemasyaraka tan	100.000.000	3 Lembaga Kemasyaraka tan	120.000.000	3 Lembaga Kemasyarakat an	150.000.000
7.01.03.2.02.0002-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	56.162.289	2 Unit	100.000.000	6 Unit	300.000.000
7.01.03.2.02.0003-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	85.641.600	1 Pokmas / Ormas	40.260.350	1 Pokmas / Ormas	45.000.000	1 Pokmas / Ormas	50.000.000	2 Pokmas / Ormas	120.000.000	4 Pokmas / Ormas	140.000.000	6 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2.02.0004-Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	N/A Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	20.000.000
7.01.03.2.03-Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	1.394.937.200	1 Laporan	1.442.287.200	1 Laporan	1.460.000.000	1 Laporan	1.800.000.000	1 Laporan	1.900.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.200.000.000
7.01.03.2.03.0002-Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyara katan	1.394.937.200	3 Lembaga Kemasyaraka tan	1.442.287.200	4 Lembaga Kemasyaraka tan	1.460.000.000	4 Lembaga Kemasyarakat an	1.800.000.000	4 Lembaga Kemasyaraka tan	1.900.000.000	4 Lembaga Kemasyaraka tan	2.000.000.000	4 Lembaga Kemasyarakat an	2.200.000.000
7.01.03.2.06-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	40.950.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	350.000.000
7.01.03.2.06.0002-Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	N/A Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	-	15 Keluarga	50.000.000	18 Keluarga	80.000.000	20 Keluarga	110.000.000	23 Keluarga	150.000.000
7.01.03.2.06.0003-Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	N/A Keluarga	-	- Keluarga	-	6 Keluarga	40.950.000	12 Keluarga	100.000.000	14 Keluarga	120.000.000	16 Keluarga	140.000.000	20 Keluarga	200.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.04-Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	90 %	249.999.928	90 %	1.767.150	90 %	40.000.000	90 %	230.000.000	90 %	280.000.000	90 %	330.000.000	90 %	360.000.000
7.01.04.2.01-Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	249.999.928	1 Laporan	1.767.150	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	270.000.000
7.01.04.2.01.0001-Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	249.999.928	1 Laporan	1.767.150	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	270.000.000
7.01.04.2.02-Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000
7.01.04.2.02.0001-Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000
7.01.05-Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan	85 %	1.817.025.632	85 %	1.690.918.799	85 %	1.778.600.000	85 %	2.028.178.623	85 %	2.310.000.000	85 %	2.460.000.000	85 %	2.780.000.000
7.01.05.2.01-Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1.817.025.632	1 Laporan	1.690.918.799	1 Laporan	1.778.600.000	1 Laporan	2.028.178.623	1 Laporan	2.310.000.000	1 Laporan	2.460.000.000	1 Laporan	2.780.000.000
7.01.05.2.01.0003-Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75 Orang	157.961.623	100 Orang	35.595.720	150 Orang	50.000.000	160 Orang	108.178.623	200 Orang	180.000.000	220 Orang	220.000.000	250 Orang	300.000.000
7.01.05.2.01.0007-Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	1.480.314.009	4 Dokumen	1.454.323.079	4 Dokumen	1.530.000.000	4 Dokumen	1.700.000.000	4 Dokumen	1.900.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	2.200.000.000
7.01.05.2.01.0008-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	178.750.000	1 Dokumen	201.000.000	1 Dokumen	198.600.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	280.000.000
				11.383.759.479		13.016.626.202		13.236.794.956		14.921.678.623		16.606.562.289		18.291.445.955		19.976.329.622

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA				
1	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2025-2029 MELAKUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekanbaru Kota sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekanbaru Kota

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEKANBARU KOTA									
1	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) (Nilai)	Nilai	80,8	81,6	81,9	82,2	82,5	82,8	83,1	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	85,67	85,8	85,9	86	86,1	86,2	86,3	
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	54,75	58,85	60	60,5	61	61,5	62	

4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2025-2029 MELAKUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pekanbaru Kota sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Pekanbaru Kota.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Pekanbaru Kota ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, September 2025

CAMAT PEKANBARU KOTA

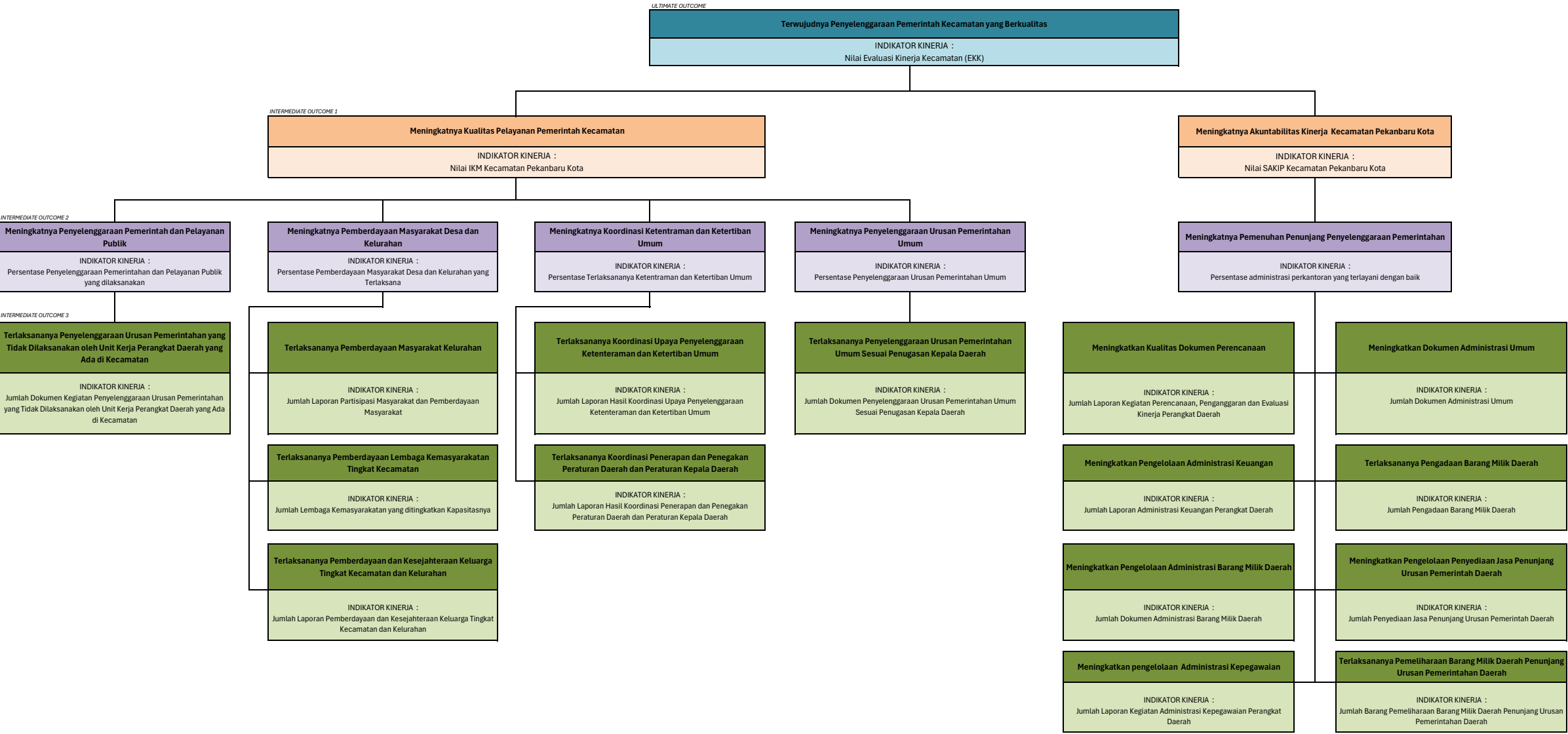


REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 199105212012062001

POHON KINERJA
KECAMATAN PEKANBARU KOTA
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025 - 2029



Pekanbaru, September 2025
CAMAT PEKANBARU KOTA



REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 199105212012062001

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025-2029
KECAMATAN PEKANBARU KOTA
KOTA PEKANBARU

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET						SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	81,6	81,9	82,2	82,5	82,8	83,1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	1 Dokumen	Menyusun Renstra yang benar dan berkualitas	2 Dokumen	Menyusun Renja yang benar dan berkualitas	2 Dokumen	Menyusun Renja yang benar dan berkualitas	2 Dokumen	Menyusun Renja yang benar dan berkualitas	2 Dokumen	Menyusun Renja yang benar dan berkualitas	1 Dokumen	Menyusun Renstra yang benar dan berkualitas
											2 Dokumen	Menyusun Renja yang benar dan berkualitas	1 Kegiatan	Mempublikasikan Renstra, Renja, PK, SKP, Ringkasan DPA dan Perubahan-perubahannya di situs OPD setiap tahunnya	1 Kegiatan	Mempublikasikan Renstra, Renja, PK, SKP, Ringkasan DPA dan Perubahan-perubahannya di situs OPD setiap tahunnya	1 Kegiatan	Mempublikasikan Renstra, Renja, PK, SKP, Ringkasan DPA dan Perubahan-perubahannya di situs OPD setiap tahunnya	1 Kegiatan	Mempublikasikan Renstra, Renja, PK, SKP, Ringkasan DPA dan Perubahan-perubahannya di situs OPD setiap tahunnya	2 Dokumen	Menyusun Renja yang benar dan berkualitas
											1 Kegiatan	Mempublikasikan Renstra, Renja, PK, SKP, Ringkasan DPA dan Perubahan-perubahannya di situs OPD setiap tahunnya	1 Kegiatan	Menyusun SKP PNS yang benar dan memiliki keselarasan antara pimpinan dan bawahannya	1 Kegiatan	Menyusun SKP PNS yang benar dan memiliki keselarasan antara pimpinan dan bawahannya	1 Kegiatan	Menyusun SKP PNS yang benar dan memiliki keselarasan antara pimpinan dan bawahannya	1 Kegiatan	Menyusun SKP PNS yang benar dan memiliki keselarasan antara pimpinan dan bawahannya	1 Kegiatan	Mempublikasikan Renstra, Renja, PK, SKP, Ringkasan DPA dan Perubahan-perubahannya di situs OPD setiap tahunnya
											1 Kegiatan	Menyusun SKP PNS yang benar dan memiliki keselarasan antara pimpinan dan bawahannya	1 Kegiatan	Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan perubahan anggaran	1 Kegiatan	Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan perubahan anggaran	1 Kegiatan	Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan perubahan anggaran	1 Kegiatan	Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan perubahan anggaran	1 Kegiatan	Menyusun SKP PNS yang benar dan memiliki keselarasan antara pimpinan dan bawahannya
											1 Kegiatan	Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan perubahan anggaran	4 Kegiatan	Melakukan pengukuran kinerja setiap periodenya	4 Kegiatan	Melakukan pengukuran kinerja setiap periodenya	4 Kegiatan	Melakukan pengukuran kinerja setiap periodenya	4 Kegiatan	Melakukan pengukuran kinerja setiap periodenya	1 Kegiatan	Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan perubahan anggaran
											4 Kegiatan	Melakukan pengukuran kinerja setiap periodenya	1 Kegiatan	Memberikan penghargaan/apresiasi dan sanksi kepada PNS berdasarkan capaian kinerja per periode	1 Kegiatan	Memberikan penghargaan/apresiasi dan sanksi kepada PNS berdasarkan capaian kinerja per periode	1 Kegiatan	Memberikan penghargaan/apresiasi dan sanksi kepada PNS berdasarkan capaian kinerja per periode	4 Kegiatan	Melakukan pengukuran kinerja setiap periodenya		
											1 Kegiatan	Memberikan penghargaan/apresiasi dan sanksi kepada PNS berdasarkan capaian kinerja per periode	4 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja per 3 bulan kepada Walikota	4 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja per 3 bulan kepada Walikota	4 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja per 3 bulan kepada Walikota	4 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja per 3 bulan kepada Walikota	1 Kegiatan	Memberikan penghargaan/apresiasi dan sanksi kepada PNS berdasarkan capaian kinerja per periode
											4 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja per 3 bulan kepada Walikota	4 Kegiatan	Menyampaikan capaian kinerja 3 bulanan melalui e-SAKIP	4 Kegiatan	Menyampaikan capaian kinerja 3 bulanan melalui e-SAKIP	4 Kegiatan	Menyampaikan capaian kinerja 3 bulanan melalui e-SAKIP	4 Kegiatan	Menyampaikan capaian kinerja 3 bulanan melalui e-SAKIP	4 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja per 3 bulan kepada Walikota
											4 Kegiatan	Menyampaikan capaian kinerja 3 bulanan melalui e-SAKIP	1 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang benar dan berkualitas	1 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang benar dan berkualitas	1 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang benar dan berkualitas	4 Kegiatan	Menyampaikan capaian kinerja 3 bulanan melalui e-SAKIP		
											1 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang benar dan berkualitas	1 Kegiatan	Mempublikasikan LKJIP tahunan di situs OPD sebelum tanggal 31 Maret	1 Kegiatan	Mempublikasikan LKJIP tahunan di situs OPD sebelum tanggal 31 Maret	1 Kegiatan	Mempublikasikan LKJIP tahunan di situs OPD sebelum tanggal 31 Maret	1 Kegiatan	Mempublikasikan LKJIP tahunan di situs OPD sebelum tanggal 31 Maret	1 Kegiatan	Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang benar dan berkualitas

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET						SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI
											1 Kegiatan	Mempublikasikan LKJIP tahunan di situs OPD sebelum tanggal 31 Maret	1 Kegiatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh inspektorat <i>secukupnya</i>	1 Kegiatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh inspektorat <i>secukupnya</i>	1 Kegiatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh inspektorat <i>secukupnya</i>	1 Kegiatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh inspektorat <i>secukupnya</i>	1 Kegiatan	Mempublikasikan LKJIP tahunan di situs OPD sebelum tanggal 31 Maret
											1 Kegiatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh inspektorat <i>secukupnya</i>									1 Kegiatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh inspektorat <i>secukupnya</i>
											2 Kegiatan	Menyediakan dan memelihara Sarpras Pelayanan agar selalu siap pakai	2 Kegiatan	Menyediakan dan memelihara Sarpras Pelayanan agar selalu siap pakai	2 Kegiatan	Menyediakan dan memelihara Sarpras Pelayanan agar selalu siap pakai	2 Kegiatan	Menyediakan dan memelihara Sarpras Pelayanan agar selalu siap pakai	2 Kegiatan	Menyediakan dan memelihara Sarpras Pelayanan agar selalu siap pakai	2 Kegiatan	Menyediakan dan memelihara Sarpras Pelayanan agar selalu siap pakai
											1 Kegiatan	Memasang SOP pelayanan yang berisikan informasi tentang persyaratan, produk dan spesifikasinya, tarif, durasi pelayanan	1 Kegiatan	Memasang SOP pelayanan yang berisikan informasi tentang persyaratan, produk dan spesifikasinya, tarif, durasi pelayanan	1 Kegiatan	Memasang SOP pelayanan yang berisikan informasi tentang persyaratan, produk dan spesifikasinya, tarif, durasi pelayanan	1 Kegiatan	Memasang SOP pelayanan yang berisikan informasi tentang persyaratan, produk dan spesifikasinya, tarif, durasi pelayanan	1 Kegiatan	Memasang SOP pelayanan yang berisikan informasi tentang persyaratan, produk dan spesifikasinya, tarif, durasi pelayanan	1 Kegiatan	Memasang SOP pelayanan yang berisikan informasi tentang persyaratan, produk dan spesifikasinya, tarif, durasi pelayanan
											1 Kegiatan	Melayani masyarakat sesuai dengan SOP	1 Kegiatan	Melayani masyarakat sesuai dengan SOP	1 Kegiatan	Melayani masyarakat sesuai dengan SOP	1 Kegiatan	Melayani masyarakat sesuai dengan SOP	1 Kegiatan	Melayani masyarakat sesuai dengan SOP	1 Kegiatan	Melayani masyarakat sesuai dengan SOP
											1 Kegiatan	Menyediakan petugas yang melayani pengaduan	1 Kegiatan	Menyediakan petugas yang melayani pengaduan	1 Kegiatan	Menyediakan petugas yang melayani pengaduan	1 Kegiatan	Menyediakan petugas yang melayani pengaduan	1 Kegiatan	Menyediakan petugas yang melayani pengaduan	1 Kegiatan	Menyediakan petugas yang melayani pengaduan
											1 Kegiatan	Meningkatkan kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Meningkatkan kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Meningkatkan kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Meningkatkan kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Meningkatkan kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Meningkatkan kedisiplinan PNS
											1 Kegiatan	Melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan PNS	1 Kegiatan	Melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan PNS
											1 Kegiatan	Memastikan masyarakat yang dilayani mengikuti survey mandiri terkait kepuasan atas pelayanan yang diberikan	1 Kegiatan	Memastikan masyarakat yang dilayani mengikuti survey mandiri terkait kepuasan atas pelayanan yang diberikan	1 Kegiatan	Memastikan masyarakat yang dilayani mengikuti survey mandiri terkait kepuasan atas pelayanan yang diberikan	1 Kegiatan	Memastikan masyarakat yang dilayani mengikuti survey mandiri terkait kepuasan atas pelayanan yang diberikan	1 Kegiatan	Memastikan masyarakat yang dilayani mengikuti survey mandiri terkait kepuasan atas pelayanan yang diberikan	1 Kegiatan	Memastikan masyarakat yang dilayani mengikuti survey mandiri terkait kepuasan atas pelayanan yang diberikan
											1 Kegiatan	Melakukan evaluasi pelayanan setiap bulannya	1 Kegiatan	Melakukan evaluasi pelayanan setiap bulannya	1 Kegiatan	Melakukan evaluasi pelayanan setiap bulannya	1 Kegiatan	Melakukan evaluasi pelayanan setiap bulannya	1 Kegiatan	Melakukan evaluasi pelayanan setiap bulannya	1 Kegiatan	Melakukan evaluasi pelayanan setiap bulannya

Pekanbaru, September 2025

SAMUT PEKANBARU KOTA



REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 199105212012062001